

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Menurut Ravalion dalam Arsyad (2010) kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas. Masyarakat miskin selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam melakukan kegiatan usaha produktif, menjangkau akses sumber daya sosial ekonomi, menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dan membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan tersebut menumbuhkan perilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat memprihatinkan dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Kemiskinan merupakan permasalahan dan isu-isu strategis yang mendapatkan prioritas utama Provinsi Nusa Tenggara Timur masih harus bekerja keras untuk dapat menanggulangi kemiskinan.

Pendapatan yang berbeda disampaikan oleh Simanjuntak (1998) yang

mengatakan bahwa jumlah penduduk dan angkatan kerja besar serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di atau negara sebenarnya tidak perlu menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di negara itu cukup kuat memenuhi macam kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja.

Menurut Kunets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro dan Smith, 2003).

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi.

Arsyad mengatakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai arti penting masalah kesempatan kerja di perkotaan, harus memperhitungkan pula masalah penambahan pengangguran terbuka yang jumlahnya lebih besar, yaitu mereka yang kelihatan aktif bekerja namun secara ekonomis sebenarnya mereka tidak bekerja secara penuh. Kelebihan tenaga kerja dan pengangguran merupakan sumber utama kemiskinan massal, baik

kemiskinan materi, maupun non-materi (Hasibuan, (1996).

Adapun data jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Nusa Tenggara Timur, 2017-2019 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Sumba Barat	29.28	24.19	29.00
2	Sumba Timur	26.18	31.22	29.01
3	Kupang	28.99	24.99	30.09
4	Timor Tengah Selatan	25.09	28.07	29.28
5	Timor Tengah Utara	19.28	21.28	29.18
6	Belu	29.28	15.70	15.54
7	Alor	21.67	21.63	21.59
8	Lembata	26.48	26.45	26.30
9	Flores Timur	10.75	11.05	10.90
10	Sikka	14.20	13.82	13.53
11	Ende	23.95	24.20	23.18
12	Ngada	12.77	12.94	12.48
13	Manggarai	21.91	20.83	20.55
14	Rote Ndao	28.81	28.08	27.95
15	Manggarai Barat	25.64	18.14	27.00
16	Sumba Tengah	36.01	34.85	34.62
17	Sumba Barat Daya	30.13	32.00	29.06
18	Nagekeo	13.48	33.50	12.85
19	Manggarai Timur	26.80	28.50	26.49
20	Sabu Raijua	31.07	30.83	30.52
21	Malaka	16.52	18.20	16.12
22	Kota Kupang	18.67	12.61	11.22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa, Tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2017 yaitu di Kab. Sumba Tengah 36.01% dan yang paling terendah Kab. Flores Timur 10.75%, Selanjutnya pada tahun 2018 Tingkat Kemiskinan tertinggi di Kab. Nagekeo 33.50% dan yang paling terendah Kab. Flores Timur 11.05%, pada tahun 2019 Tingkat Kemiskinan tertinggi di Kab. Sumba Tengah 34.62% dan yang paling terendah di Kota Kupang 11.22%.

Terlihat bahwa, dari tahun 2017-2019 itu dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Ada beberapa daerah yang mengalami penurunan, dan ada beberapa daerah yang tetap atau ada juga yang mengalami peningkatan kemiskinan.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi
Nusa Tenggara Timur, 2017-2019 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Sumba Barat	2.38	2.37	2.38
2	Sumba Timur	4.78	4.86	4.74
3	Kupang	7.05	6.49	7.40
4	Timor Tengah Selatan	8.78	9.42	8.58
5	Timor Tengah Utara	4.72	4.90	4.66
6	Belu	4.04	4.02	4.03
7	Alor	3.84	4.06	3.77
8	Lembata	2.60	2.52	2.62
9	Flores Timur	4.76	4.96	4.69
10	Sikka	6.00	6.41	5.87
11	Ende	5.15	5.56	5.02
12	Ngada	3.01	3.04	2.99
13	Manggarai	6.23	6.24	6.20
14	Rote Ndao	3.02	2.56	3.15
15	Manggarai Barat	4.98	4.74	5.03
16	Sumba Tengah	1.34	1.33	1.34
17	Sumba Barat Daya	6.28	6.06	6.32
18	Nagekeo	2.70	2.78	2.67
19	Manggarai Timur	5.30	5.40	5.26
20	Sabu Raijua	1.73	1.57	1.78
21	Malaka	3.52	3.50	3.52
22	Kota Kupang	7.81	7.19	7.97

sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa, Jumlah Penduduk tertinggi pada tahun 2017 yaitu di Kab. Timor Tengah Selatan (TTS) 8.78% dan yang paling terendah Kab. Sumba Tengah 1.34%, Selanjutnya pada tahun 2018 Jumlah Penduduk tertinggi di Kab. Timor Tengah Selatan (TTS) 9.42% dan yang paling terendah Kab. Sumba Tengah 1.33%, pada tahun 2019 Jumlah Penduduk tertinggi di Kab. Timor Tengah Selatan (TTS) 8.58% dan yang paling terendah di

Kab. Sumba Tengah 1.34 %.

Terlihat bahwa, dari tahun 2017-2019 itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan penduduk. Ada beberapa daerah yang mengalami penurunan, dan ada beberapa daerah yang tetap atau ada juga yang mengalami peningkatan peningkatan jumlah penduduk.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun, 2017-2019 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Sumba Barat	5.03	5.07	5.12
2	Sumba Timur	5.17	5.22	5.13
3	Kupang	5.10	5.12	5.13
4	Timor Tengah Selatan	5.02	5.10	5.10
5	Timor Tengah Utara	5.01	5.03	4.90
6	Belu	8.29	5.60	5.38
7	Alor	5.04	5.06	5.13
8	Lembata	5.03	5.04	5.09
9	Flores Timur	4.49	4.78	4.86
10	Sikka	5.27	8.09	7.21
11	Ende	5.24	5.42	5.79
12	Ngada	5.17	5.88	5.03
13	Manggarai	5.78	5.06	5.05
14	Rote Ndao	5.42	5.42	5.43
15	Manggarai Barat	5.11	5.23	5.54
16	Sumba Tengah	6.92	7.01	5.01
17	Sumba Barat Daya	5.05	5.01	5.06
18	Nagekeo	4.83	4.74	4.23
19	Manggarai Timur	5.08	5.03	5.10
20	Sabu Raijua	5.10	5.13	5.12
21	Malaka	5.11	6.17	7.90
22	Kota Kupang	6.83	5.09	6.29

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa, Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada tahun 2017 yaitu di Kab. Belu 8.29% dan yang paling terendah Kab. Nagekeo 4.83%, Selanjutnya pada tahun 2018 Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Kab. Sikka 8.09% dan yang paling terendah Kab. Nagekeo 4.74%, pada tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Kab. Malaka 7.90% dan yang paling

terendah di Kab. Nagekeo 4.23%.

Terlihat bahwa, dari tahun 2017-2019 itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa daerah yang mengalami penurunan, dan ada beberapa daerah yang tetap atau ada juga yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi NTT
Tahun 2017-2019 (Persen)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT				
No	Wilayah	2017	2018	2019
1	Sumba Barat	3.83	4.06	3.15
2	Sumba Timur	2.90	1.42	2.13
3	Kupang	3.52	2.71	2.78
4	Timor Tengah Selatan	1.70	1.01	1.94
5	Timor Tengah Utara	0.60	5.56	5.00
6	Belu	2.47	4.56	5.19
7	Alor	1.86	4.09	3.03
8	Lembata	4.18	5.40	4.31
9	Flores Timur	5.45	4.01	3.09
10	Sikka	5.80	5.45	3.56
11	Ende	3.66	5.89	2.98
12	Ngada	3.23	5,80	3.38
13	Manggarai	4.09	3.21	3.11
14	Rote Ndao	2.52	5.11	2.73
15	Manggarai Barat	5.89	0.85	4.42
16	Sumba Tengah	4.26	3.57	3.43
17	Sumba Barat Daya	2.98	5.58	1.25
18	Nagekeo	3.60	2.88	1.22
19	Manggarai Timur	2.06	1.57	4.72
20	Sabu Raijua	2.75	2.12	2.89
21	Malaka	4.01	3.79	2.90
22	Kota Kupang	8.24	5.01	7.45

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Berdasarkan Tabel 1.4 terlihat bahwa, Jumlah pengangguran tertinggi pada tahun 2017 yaitu di Kota Kupang 8.24% dan yang paling terendah Kab. Timor Tengah Selatan (TTU) 0.60%. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah

pengangguran tertinggi di Kab. Ende 5.89% dan yang paling terendah Kab. Timor Tenggara Selatan (TTS) 1.01%. pada tahun 2019 jumlah pengangguran tertinggi di Kota Kupang 7.45% dan yang paling terendah di Kab. Nagekeo 1.22%.

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi NTT** “

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh parsial variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTT tahun 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh simultan variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Provinsi NTT tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka secara persial terhadap kemiskinan di Provinsi NTT.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terbuka secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diantara lain yaitu :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat tercapainya pemahaman penulis akan

hubungan pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan. Secara khusus pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau evaluasi dalam membuat perencanaan pembangunan daerah atau membuat program kebijakan perekonomian.

3. Bagi peneliti lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi yang memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal serupa.